

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,002.
3. Dana Alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,042.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Pemberian hak, kewajiban, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan atau biasa disebut otonomi daerah, merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah, Implementasi dari pendapatan asli daerah sendiri dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang harus diutamakan dari sumber pendanaan yang lainnya, karena dengan pendapatan asli daerah yang maksimal maka akan menambah sumber pembiayaan daerah dalam hal belanja daerah secara mandiri. Belanja daerah yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemenuhan infrastruktur yang merata dan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Transfer APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat berupa belanja daerah. Semakin tinggi Alokasi Transfer APBN Kepada APBD diharapkan membuat pemerintah daerah memprioritaskannya untuk Belanja Daerah karena dengan belanja daerah yang tinggi pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang layak untuk masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik dan serta dapat meningkatkan nilai investasi didalam daerah itu sendiri.

2. Implikasi Praktis

Dari hasil penulisan tiga variabel di atas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Sehingga pemerintah daerah tidak salah dalam menentukan langkah untuk perkembangan daerahnya ke depan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik yang baik akan membawa dampak yang positif terhadap kualitas pelayanan publik serta perkembangan di daerah tersebut.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten diharapkan sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan belanja daerahnya agar bisa membawa dampak yang positif terhadap masyarakat dan kualitas pelayanannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian maupun periode penelitian. Kemudian menambah variabel lain yang diduga berpengaruh dan menambah data populasi penelitian dan periode penelitian lebih dari 5 tahun, sehingga dapat digunakan untuk mengeneralisasi hasil penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, karena pemerintah daerah telah memberikan keterbukaan informasi sesuai undang-undang yang berlaku, karena hal tersebutlah yang dapat membantu memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tak lepas dari beberapa keterbatasan penelitiannya yang tak dapat dihindari selama penelitian:

1. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada tiga variabel, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mengarah pada sektor publik. Misalnya: variabel dana bagi hasil dan lain-lain yang didukung dengan teori terbaru.
2. Adanya keterbatasan dalam metode penelitian, beberapa cara perhitungan variabel memungkinkan mengandung beberapa kelemahan. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan uji analisis kuantitatif yang lain seperti PLS sebagai bahan perbandingan.